

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.5.1 Konsep Perlindungan Hukum Bagi Rakyat	10
1.5.2 Konsep Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa	17
1.5.3 Konsep-Konsep Berkaitan Dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan.....	19
1.6 Metode Penelitian	29
1.6.1 Tipe Penelitian.....	29
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	30
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	31

1.6.4	Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	31
1.7	Sistematika Penulisan	32
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH.....		
33		
2.1	KONSEP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH.....	33
2.1.1	Konsep Perbuatan Melanggar Hukum (<i>Onrechtmatige Daad/OD</i>).....	33
2.1.2	Konsep Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (<i>OOD</i>).....	36
2.1.3	Tindakan Pemerintahan.....	38
2.1.4	Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara.....	48
2.2	PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA MASYARAKAT.....	51
2.2.1	Perlindungan Hukum Non Yudisiil.....	53
2.2.2	Perlindungan Hukum Yudisiil.....	63
2.3	KOMPETENSI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TUN DALAM MENGADILI PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH.....	63

2.3.1	Kompetensi Peradilan Umum Dalam Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah.....	64
2.3.2	Kompetensi Peradilan TUN Dalam Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah.....	66
2.3.3	Peralihan Kewenangan Mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah(OOD) Dari Peradilan Umum Ke Peradilan TUN.....	73
2.3.4	Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Sepanjang Masa.....	77

**BAB III DASAR PENGUJIAN (TOETSING GRONDEN) ATAS
SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH
PEMERINTAH PADA PERADILAN TATA USAHA
NEGARA..... 78**

3.1	Prosedur Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pada Peradilan Tata Usaha Negara... 78	78
3.1.1	Gugatan.....	78
3.1.2	Tenggang Waktu.....	81
3.1.3	Upaya Administrasi.....	82
3.1.4	Prosedur Pengajuan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.....	86
3.2	Prosedur Pemeriksaan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah di Peradilan Tata Usaha Negara.....	86
3.2.1	Penelitian Administrasi dan Prosedur Dismissal.....	89

3.2.2	Pemeriksaan Persiapan.....	92
3.2.3	Jawab Jinawab.....	93
3.2.4	Pembuktian.....	96
3.3	PENGUJIAN OLEH HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH.	97
3.3.1	Dasar Pengujian Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Berdasarkan Hukum Perdata.....	99
3.3.2	Dasar Pengujian Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Berdasarkan Hukum Administrasi.....	106
3.3.3	Putusan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah.....	109
	BAB IV PENUTUP.....	114
4.1	Kesimpulan.....	114
4.2	Saran.....	115

DAFTAR BACAAN